



**DIREKTORAT INFORMASI DAN MEDIA**

**PRESS CABLE**

**NOMOR : 014/22012009**  
**HARI : KAMIS**  
**TANGGAL : 22 JANUARI 2009**

**DAFTAR ISI**

		<b>Halaman</b>
<b>I.</b>	<b>INTERNASIONAL</b>	
	Indonesia-Korsel Tingkatkan Kerja Sama Dwipihak	3
	Dunia Berharap AS Berubah Kebijakan Neokonservatif Bush Harus Ditinggalkan	3
	Presiden Baru AS: Pidato Obama Kecewakan Dunia Internasional	4
	Israel Tarik Seluruh Pasukan: Penduduk di Wilayah Rafah Menuntut Ganti Rugi	5
	Obama Telepon Abbas, Janjikan Perdamaian di Timur Tengah	6
	Close Guantanamo, Indonesians tell Obama	7
	China to grant remote sensing satellite to Indonesia	7
	'ASEAN's open market could avert global crisis impact'	8
<b>II.</b>	<b>NASIONAL</b>	
	<b>A. POLITIK</b>	
	President Yudhoyono orders immediate rehabilitation of quake-hit Sorong	8
	Hasil Survey TI: Kepolisian dan Peradilan Paling Banyak Praktik Suap	9
	Pengamanan di Kedubes Mesir Jakarta Diperketat	10
	<b>B. EKONOMI</b>	
	Pemerintah Masih Bahas Diskon Bea Masuk CPO	11
	Mekanisme Impor Pangan Terlalu Mudah	11

		Realisasi Investasi 2008 Lampau Target	12
	<b>C.</b>	<b>SOSBUD</b>	
		FK Unair Diaudit Tim Audit Internasional Belanda	13
	<b>D.</b>	<b>HANKAM</b>	-
	<b>E.</b>	<b>HUKUM</b>	
		BPK Sulit Audit Proyek Pinjaman Asing	14
	<b>F.</b>	<b>OLAHRAGA</b>	-
	<b>G.</b>	<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>	
		30 Perusahaan Sawit Langgar Kawasan Konservasi	14
	<b>III.</b>	<b>ARTIKEL</b>	
		Membangun Kembali Gaza (Oleh Mayjen (Purn) AT Paruntu)	15
		Perang Palestina dan Kekalahan Israel (Oleh Sultan Sulaiman)	16
	<b>IV.</b>	<b>LAIN-LAIN</b>	-
	<b>V.</b>	<b>EDITORIAL</b>	
		Editorial: The rocket story	17
		Tingginya Harapan buat Obama	18
		Pelajaran dari Inaugurasi Obama	18

Jakarta, 22 Januari 2009  
Sub Direktorat Berita  
Direktorat Informasi dan Media

## **I. INTERNASIONAL :**

### **1. Indonesia-Korsel Tingkatkan Kerja Sama Dwipihak**

Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda melakukan pertemuan dengan timpalannya dari Korea Selatan Yu Myung-hwan guna meningkatkan hubungan dwipihak.

Menurut keterangan resmi dari Departemen Luar Negeri di Jakarta, Rabu, dalam pertemuan itu kedua menlu bertukar pikiran mengenai langkah-langkah bersama yang perlu ditempuh untuk meningkatkan kerjasama antara kedua negara, sekaligus membahas isu-isu regional dan global yang menjadi kepentingan bersama kedua negara.

Sejak pembukaan hubungan diplomatik pada 1966, hubungan dwipihak Indonesia-Korea Selatan terus mengalami perkembangan dan peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun.

Hubungan yang erat itu terlihat pada peningkatan pesat kerja sama dalam lima tahun terakhir yang tercermin dari semakin bertambahnya ikatan kerja sama kedua negara di berbagai bidang mencakup politik, keamanan, ekonomi, perdagangan dan sosial budaya.

Hubungan kedua negara memasuki lembaran baru dengan ditandatanganinya Deklarasi Bersama Kemitraan Strategis antara Indonesia-Korea Selatan untuk mempromosikan persahabatan dan kerja sama di abad 21 pada saat kunjungan Presiden Korea Selatan Roh Moo-Hyun ke Indonesia pada 2-4 Desember 2006.

Kunjungan Myung-hwan pada 20-22 Januari 2009 adalah kunjungan resmi pertamanya ke Indonesia semenjak ia dilantik pada Februari 2008.

Dalam kunjungan itu Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Korea Selatan didampingi dengan Direktur Jenderal urusan Asia Selatan dan Pasifik Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Lee Kyung-soo.

Myung-hwan juga melakukan kunjungan kehormatan kepada wakil presiden Jusuf Kalla. (ANTARA)

### **2. Dunia Berharap AS Berubah Kebijakan Neokonservatif Bush Harus Ditinggalkan**

Masyarakat dunia menyambut pidato Presiden AS Barack H Obama dengan harapan agar Amerika Serikat di bawah kepemimpinannya benar-benar berubah dalam banyak hal, terutama dalam berhubungan dengan masyarakat internasional.

Harapan itu disampaikan bukan saja oleh pemerintahan di negara-negara yang selama ini cenderung "bersitegang" dengan AS, tetapi juga disampaikan para sekutu AS sendiri.

Jepang merupakan sekutu dekat AS, tetapi belum lama ini kecewa atas sikap AS yang mengeluarkan Korea Utara (Korut) dari daftar hitam AS tentang negara-negara yang mensponsori terorisme. Jepang berharap AS bisa bekerja sama erat kembali dengan Korsel dan Jepang dalam perundingan enam pihak untuk melucuti program nuklir Korut.

Perdana Menteri (PM) Jepang Taro Aso, Rabu (21/1), menyatakan, dia siap bekerja saling bahu membahu dengan Presiden AS Barack Obama untuk mengatasi krisis yang menghantam ekonomi global. "Saya kira dia memahami krisis ekonomi dunia, sama dengan pemahaman saya," ungkapnya.

Kanselir Jerman Angela Merkel yang juga mempunyai hubungan dekat dengan Presiden AS sebelumnya, George W Bush, mengharapkan pada era baru ini AS bisa sepakat bahwa tidak ada satu negara pun yang bisa menyelesaikan berbagai masalah di dunia ini sendirian.

Menteri Luar Negeri Jerman Frank-Walter Steinmeier, Rabu, juga mengharapkan AS—di bawah pemerintahan yang baru—melakukan diplomasi sangat aktif, khususnya di Timur Tengah.

Steinmeier mengatakan, dari pidato Barack Obama terlihat bahwa kebijakan luar negeri baru AS bisa dirangkum sebagai kebijakan "lebih banyak mitra dan lebih sedikit musuh".

"Obama dan Menteri Luar Negeri baru (Hillary Clinton) telah meletakkan penekanan pada kerja sama, bukan pada konfrontasi atau pemisahan," papar Steinmeier. Hillary Clinton sudah berjanji akan cermat soal diplomasi.

#### **Reaksi dunia Muslim**

Di Jakarta, Ketua Nahdlatul Ulama Maskuri Abdilah mengatakan, sangat baik apabila Obama ingin mencari jalan baru untuk berjalan bersama negara-negara Muslim di dunia. "Akan tetapi, pertama-tama, dia harus mengubah kebijakan AS atas Israel dan konflik Palestina," kata Maskuri. Dia menambahkan bahwa konflik Israel-Palestina adalah akar masalah bagi banyak konflik lain antara Muslim dan Barat.

Dari Pakistan, guru besar Hubungan Internasional Universitas Quaid-e-Azam, Ishtiaq Ahmed, mengatakan, Obama harus menerima realitas di kawasan. "Tentara tidak menyelesaikan masalah di Irak dan tentara juga tidak akan berhasil di Afganistan. Obama harus menarik kembali kebijakan-kebijakan neokonservatif Bush yang menciptakan banyak keretakan antara AS dan dunia Muslim," paparnya.

Adapun Menteri Luar Negeri Iran Manouchehr Mottaki, seperti dikutip kantor berita Iran, IRNA, mendesak Obama mengubah kebijakan-kebijakan AS di Timur Tengah. Obama perlu mempekerjakan penasihat-penasihat baru, yang akan mengatakan "kebenaran" tentang Timur Tengah. (Kompas)

### **3. PRESIDEN BARU AS: Pidato Obama Kecewakan Dunia Internasional**

Pidato Presiden AS Barack Obama, yang disampaikan seusai disumpah di Gedung Capitol, Washington, Rabu dini hari WIB, mengecewakan banyak kalangan di Indonesia.

Mereka menilai, pidato perdana Obama itu tidak menjawab harapan dunia internasional. Karena itu, komunitas internasional masih harus bersabar menunggu kiprah presiden ke-44 AS tersebut.

Demikian rangkuman pendapat berbagai kalangan, seperti anggota Komisi I DPR Hajriyanto Y Tohari (FPG), Yuddy Chrisnandi (FPG), Almuzzammil Yusuf (FPKS), Sekjen DPP PPP Irgan Chairul Mahfiz, Ketua Umum DPP PBB MS Kaban, juga pengamat politik Yon Machmudi. Mereka dihubungi secara terpisah di Jakarta, Rabu.

Hajriyanto menjelaskan, pidato Obama belum tegas dan tidak spesifik menjawab harapan dunia internasional. Obama hanya mengatakan pemerintahannya akan memperbarui hubungannya dengan dunia Islam, tapi akan tetap pro-Israel.

"Obama adalah Obama. Dia adalah Presiden Amerika Serikat (AS) sebagaimana 43 presiden negara itu sebelumnya. AS adalah negara besar dan tua dengan sistem yang bukan hanya sudah sangat mapan, tetapi juga nyaris status quo yang secara sistemik dan kultural pro-Israel," katanya.

Menurut Hajriyanto, pandangan pemerintah AS terhadap dunia Islam di bawah Obama tidak akan berubah dan tetap akan memperlakukan Islam sebagai rival. Karena itu, dia meminta dunia Islam agar tidak berharap banyak terhadap Obama.

Yuddy Chrisnandi juga mengatakan bahwa dunia Islam harus bersabar menyikapi langkah Obama. "Harus disadari bahwa Obama menghadapi kondisi ekonomi domestik yang pelik. Dengan alasan bahwa itu menjadi prioritas kebijakannya, maka negara-negara Islam, khususnya di Timur Tengah, masih harus sabar menunggu pengaruh perubahan yang dia janjikan," ujarnya.

Senada dengan itu, Almuzzammil Yusuf berharap Obama benar-benar membawa perubahan besar di dunia, khususnya bagi umat Muslim. "Kita tetap menaruh harapan pada Obama karena tampaknya secara karakter dia akan jauh berbeda dengan presiden sebelumnya yang haus perang," katanya.

Irgan Chairul Mahfiz juga menilai keinginan Obama untuk membangun hubungan baru dengan dunia Islam masih harus dibuktikan. Sementara MS Kaban menilai pidato Obama sama sekali tidak menunjukkan cara pandang baru Pemerintah AS terhadap dunia Islam.

Yon Machmudi juga menilai pidato Obama belum menjawab harapan dunia Islam khususnya. "Obama tidak tegas dan spesifik menyampaikan sikap politik luar negerinya," katanya.

Yon mencontohkan, pernyataan Obama soal menyerahkan masa depan Afghanistan dan Irak kepada rakyat masing-masing negara sungguh normatif. Menurut dia, akan berbeda jika yang disampaikan Obama adalah komitmen untuk secepatnya menarik pasukan AS dari dua negara tersebut.

Menurut Yon, pidato Obama yang menyebut kerja sama dengan dunia Muslim berdasarkan kepentingan bersama dan sikap saling menghormati adalah klasik. "Tentu saja kepentingan nasional AS akan menjadi pertimbangan utama," katanya.

Sementara itu, se usai upacara pelantikannya yang meriah, Obama langsung bekerja. Dia memerintahkan Menteri Pertahanan Robert Gates, satu-satunya menteri dalam pemerintahan Presiden Bush yang dipertahankan di posisinya, agar menunda pelaksanaan pengadilan militer di Guantanamo.

Obama memerintahkan agar pengadilan militer di Guantanamo ditunda selama 120 hari sambil menunggu peninjauan kembali sistem hukum yang diberlakukan kepada para tersangka pelaku terorisme.

Perintah itu langsung disampaikan Gates kepada Mahkamah Militer Guantanamo yang hendak mengadili lima pria yang didakwa sebagai tersangka pelaku serangan 11 September serta seorang warga Kanada, Omar Khadr, yang dituduh membunuh tentara AS dengan granat pada tahun 2002 di Afghanistan.

Obama juga menyatakan akan memberikan perhatian penuh terhadap penjara militer khusus di Kuba itu, tempat AS menahan 245 tersangka pelaku terorisme. Obama berharap bisa menghentikan kritik tajam yang bermunculan mengenai pengadilan ciptaan Bush dan Kongres pada 2006 itu.

Pengadilan militer itu sebenarnya akan diadakan pada Selasa pagi sebelum Obama membacakan sumpah jabatan. Namun, Mahkamah Militer menundanya sampai Rabu waktu setempat. Tanpa diduga, Obama memberikan perintah agar pelaksanaan pengadilan ditunda selama 120 hari agar peninjauan kembali bisa dilakukan.

Di hari pertama sebagai presiden, Obama juga memusatkan perhatian pada strategi perang AS. Bersama Penasihat Militer dan Pertahanan Keamanan Nasional, sebagai pimpinan tertinggi militer, dia mendiskusikan strategi perang AS di Irak dan Afghanistan.

Menurut beberapa pejabat, Obama akan mengadakan video telekonferensi pada Rabu malam (Kamis WIB) dengan semua anggota tim Dewan Keamanan Nasional dan juga komandan militer AS di dua zona perang, yaitu Jenderal Ray Odierno (komandan militer AS di Irak) dan Jenderal David McKiernan (komandan militer AS di Afghanistan). Hadir pula komandan militer AS di Timur Tengah, Jenderal David Petraeus.

Sebelumnya, Obama mengatakan menarik mundur pasukan AS dari Irak dalam 16 bulan ke depan dan membuat kemajuan besar di Afghanistan. Namun, dalam pidato pelantikannya, dia hanya memberikan sedikit gambaran tentang apa yang akan dia lakukan.

"Kami akan mulai meninggalkan Irak dan mengembalikannya dengan penuh tanggung kepada rakyatnya. Kita juga akan menciptakan perdamaian di Afghanistan," katanya ketika itu.

Terkait pidato itu pula, Pemerintah China menilai ada dua kata sensitif yang dikatakan Obama. Karena itu, siaran langsung pidato Obama itu serta-merta disensor saat Obama menyebut kata "fasisme dan komunisme". (Suara Karya)

#### **4. Israel Tarik Seluruh Pasukan: Penduduk di Wilayah Rafah Menuntut Ganti**

Setelah selama 22 hari dibombardir tanpa henti oleh pasukan Israel, kini rakyat di Jalur Gaza bisa sedikit bernapas lega. Militer Israel mengaku penarikan pasukan dari Gaza telah berakhir.

"Pada pagi hari ini tentara yang terakhir dari pasukan Israel telah meninggalkan Jalur Gaza. Meski demikian, seluruh pasukan masih bertahan di sekeliling Gaza untuk menanggapi dan mengantisipasi apabila kembali terjadi serangan lanjutan," kata juru bicara militer Israel, Rabu (21/1).

Proses penarikan seluruh tentara Israel itu telah dimulai hari Minggu atau setelah Israel secara sepihak mengumumkan gencatan senjata dan diikuti kelompok pejuang Palestina. Kelompok pejuang Hamas memberikan waktu hingga satu pekan kepada Israel untuk menarik seluruh pasukan dan membuka semua pintu perbatasan dan penyeberangan masuk ke wilayah Gaza.

Seiring dengan penarikan tentara itu, armada kapal perang Israel masih mengeluarkan tembakan sporadis di perairan Gaza di pagi hari. Juru bicara pejuang Hamas, Fawzi Barhum, menyebutkan, penarikan seluruh pasukan itu tak cukup dan tidak menyelesaikan masalah di Gaza. "Kami menuntut semua blokade dibuka penuh. Begitu pula dengan perbatasan supaya rakyat kami dapat hidup aman dan damai," ujarnya.

Hamas juga meminta pegawai pemerintah kembali bekerja normal meski gedung kantor-kantor pemerintahan di Gaza City tinggal puing setelah diserang Israel sejak 27 Desember. Akibat agresi Israel dari darat, udara, dan laut, sekitar 1.300 orang tewas dan 5.300 orang terluka. Menurut biro statistik Gaza, sekitar 4.100 rumah hancur dan 17.000 rusak.

Perdana Menteri Israel Ehud Olmert menegaskan, Israel hanya bersedia membantu rekonstruksi Gaza jika upaya itu dipimpin oleh organisasi-organisasi internasional, Mesir, ataupun Otoritas Palestina di Tepi Barat. "Seharusnya Hamas yang bertanggung jawab atas kerusakan di Gaza dan warga sipil yang jadi korban," ujarnya.

#### **Ganti rugi**

Sementara dari Rafah dilaporkan, sejumlah salon potong rambut di kota Rafah, Mesir, mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pemerintah Israel melalui aparat polisi Mesir. Beberapa bangunan salon tadi retak dan beberapa petugas salon terluka akibat serpihan rudal dari pesawat tempur Israel. Beberapa penduduk di Rafah juga menggugat ganti rugi kepada Pemerintah Israel akibat kerusakan beberapa bagian rumah, seperti atap rumah rontok, kaca pecah, dan dinding yang retak.

Aparat keamanan Mesir telah menemukan sedikitnya enam rudal Israel yang tidak meledak di berbagai tempat di Rafah, Mesir.

Pemerintah Hamas pimpinan Ismail Haniya meminta seluruh pegawai pemerintah masuk agar bisa memulai program pembangunan kembali Gaza dan memulai lagi kehidupan normal bagi seluruh penduduk. Hamas mengimbau penduduk agar menghindari tempat-tempat berbahaya yang diduga ditanami ranjau oleh Israel atau masih menyisakan sisa rudal atau bahan-bahan peledak yang belum meledak.

Regu penyelamat dari tim dokter dan relawan yang datang dari berbagai negara terus bekerja keras memberi perawatan kepada para korban terluka di rumah sakit Gaza, terutama rumah sakit utama Sifa, Gaza City. Sementara relawan membersihkan reruntuhan bangunan yang hancur.

Sementara itu negara-negara di dunia Arab dalam forum Konferensi Tingkat Tinggi ekonomi Arab yang digelar di Kuwait gagal menyepakati suatu mekanisme dan menentukan pihak yang menangani proyek-proyek pembangunan kembali seluruh wilayah Gaza yang hancur. Sebagian negara Arab menolak apabila Pemerintah Hamas yang akan menangani proyek pembangunan kembali Gaza.

Alasannya, pemberian proyek itu kepada Hamas justru semakin memberikan legitimasi kepada Hamas. Adapun sebagian negara Arab lainnya mendukung Hamas sebagai pemimpin proyek pembangunan kembali Gaza. Alasannya, Hamas secara de facto adalah pihak yang berkuasa di Gaza. KTT ekonomi Arab itu akhirnya tidak mengeluarkan rekomendasi mengenai pemimpin dan yang menangani proyek pembangunan kembali Gaza. (Kompas)

### **5. Obama Telepon Abbas, Janjikan Perdamaian di Timur Tengah**

Presiden AS Barack Obama dijanjikan kepada Presiden Palestina Mahmud Abbas untuk bekerja menuju sebuah perdamaian yang langgeng di Timur Tengah.

Hubungan telepon dengan petinggi otoritas Palestina itu menjadi telepon pertama kepada pemimpin negara asing, setelah resmi menjadi Presiden AS.

Hal itu diungkapkan juru bicara Abbas, Nabil Abu Rudeina di Ramallah, Tepi Barat, Palestina, Rabu (21/1).

"Ini pertama kali telepon untuk pemimpin negara dan itu saya lakukan hanya setelah satu jam berada di kantor saya," demikian penuturan Obama kepada Abbas, seperti diungkapkan Rudeina.

"Dia (Obama) mengatakan akan menggunakan segala upaya untuk mencapai perdamaian secepat mungkin," tambah juru bicara Abbas itu.

"Presiden Abbas mendesak dia (Obama) untuk bekerja ke arah perdamaian berdasarkan resolusi internasional," kata Abu Rudeina.

Obama dan Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton telah berjanji, penyelesaian konflik Israel-Palestina menjadi yang harus segera diatasi, setelah keduanya resmi menempati kantor masing-masing.

Namun, tidak ada konfirmasi apakah Obama juga menghubungi Perdana Menteri Israel Ehud Olmert.

Sedangkan penasihat Abbas mengakui terkejut dengan begitu cepatnya Obama mendudukkan konflik di Timur Tengah sebagai salah satu prioritas. "Kami tidak mengharapkan demikian cepat panggilan dari Presiden Obama tapi kami tahu bagaimana dia serius mengenai masalah Palestina," kata Yasser Abed Rabbo.

Saat pidato se usai pelantikan, Selasa (20/1), Obama berjanji melakukan pendekatan baru kepada dunia Muslim. "Untuk di dunia Muslim, kita mencari cara baru ke depan, berdasarkan kepentingan bersama dan saling menghormati," katanya Presiden AS pertama yang berkulit hitam itu. (Media Indonesia)

## **6. Close Guantanamo, Indonesians tell Obama**

Indonesian human rights activists staged a rally in Jakarta on Wednesday calling for new US President Barack Obama to immediately close the Guantanamo Bay prison camp.

Around 20 activists wearing faceless white masks and orange jumpsuits similar to Guantanamo inmates' uniforms were joined by scores of supporters in a march on the US embassy.

Carrying banners reading "Stop Torture," they demanded Obama close the "war on terror" prison in Cuba in his first 100 days in office.

"Torturing terrorist suspects is against the values of human rights advocated by America," read a statement distributed by the protesters from a coalition of human rights groups.

"In closing Guantanamo, the US will return to its moral values as a civilised country that respects human dignities."

But they said closing Guantanamo was only a "first step" for Obama.

"The closure of Guantanamo must be the first step that Barack Obama needs to do before closing other US secret prison facilities in Afghanistan, the British Indian Ocean territory of Diego Garcia, Jordan, Pakistan, Thailand and in Eastern Europe," the statement was quoted by FP as saying.

Obama has promised to shut down the prison as well as former president George W. Bush's military commissions.

But it could take several months to fully close down the detention camp, as US officials will have to transfer some of the approximately 245 prisoners there to other countries and then decide whether to try the remaining suspects in US courts. (ANTARA)

## **7. China to grant remote sensing satellite to Indonesia**

The Chinese government will grant Indonesia a remote sensing satellite to help monitor and provide early detections on events taking place in the sea, an official said.

"China will grant Indonesia a satellite for monitoring happenings and developments in the sea. With the satellite, Indonesia's sensing capability at sea would be increased," Head of the National Sea Security Coordination Agency (Bakormala) Tri Yuswoyo said here on Wednesday.

He said that Indonesia welcomed the Chinese grant because Indonesia had a vast sea while its sensing capability was still limited. Yuswoyo said that many government agencies are conducting activities at sea such as the Customs and Excise office, the Maritime and Fisheries Ministry, and the Navy.

So far, government agencies which carried out sea patrols were lacking many important equipment and facilities while Indonesia has a vast territorial sea, he said.

But with a remote sensing device, which China will provide, the agencies would be able to monitor happenings at sea in the interest of security and prosperity of the people, he added.

"The satellite will be owned by the Bakormala while the results of its monitoring could be used by other agencies in the country," he added. (ANTARA)

## **8. 'ASEAN's open market could avert global crisis impact'**

The ASEAN chief called on Southeast Asian states to open up their markets amid global financial woes that have seen developed economies tilt toward protectionism.

The ASEAN Secretary-General Surin Pitsuwan told a forum on Tuesday that the worsening economic crisis had forced many nation-states to resort to protectionism as a short-term solution in a movement that was believed would bring further adverse impact to economic improvement.

"ASEAN countries have to open up their markets as stipulated in the ASEAN Charter they have ratified and [which] came into force on Dec. 15. An integrated and open market would help address the current financial crisis, which has started to hit our region," he said at a business forum organized by the Thai Business Club in Indonesia

An open market in the region of half a billion people is seen as being able to cope with the situation, after a plunge in exports to its biggest markets — the United States, the European Union and Japan, whose economies are the most affected by the current global finance crisis.

The unified market, due to be launched by 2015 under the ASEAN Charter's one economic community, would embrace ten memberstates with different levels of prosperity, from the international trade hub of Singapore to Myanmar, the target of western sanctions.

The unified market would allow for the free flow of goods, services, investment and skilled professionals among the member countries to integrate ASEAN economies with the global economy.

One of the most immediate implications of the building of an economic community would be the elimination of tariffs and non-tariff barriers in 12 priority sectors, including agricultural, rubber and wood-based products along with air travel, Internet linkages, automotive, electronics, fisheries, health-care, logistics, textile and apparel, and tourism, by 2010. The blueprint for the economic community is poised to be finalized during the ASEAN Summit in Thailand in late February.

Surin warned leaders in the region's more developed economies about certain groups that might be hampering the building of the ASEAN economic community with an eye to their own interests.

"People think that the more developed economies in ASEAN might be better prepared for an integrated, open market, but the opposite is true," he said.

"Less developed economies will be more willing to open up because they have not much to protect and less vested interests that would try to influence decisions."

Surin also called on member states to harmonize customs procedures and common production standards, ease transit of goods and streamline bureaucracy to herald the unified market because, in the end, it was not tariff barriers that mattered to the regional business community as much as how well a country's infrastructure could facilitate the investments.(The Jakarta Post)

**II. NASIONAL :**

**A. POLITIK :**

**1. President Yudhoyono orders immediate rehabilitation of quake-hit Sorong**

President Susilo Bambang Yudhoyono called on the West Papua provincial government particularly the Sorong district administration to immediately carry out rehabilitation and construction in areas affected by earthquake on January 4.

He made the request after listening to explanation on the problem made by West Papua Governor Abraham Octavianus Atururi here on Wednesday.

"After the stage of emergency response is done immediately conduct rehabilitation and reconstruction," he said.

President Yudhoyono said rehabilitation and reconstruction had to be done based upon good planning and in line with the planning.

"We have already had a system for it. Use the reference for budget use according to the system. If the damage cannot as yet be overcome using the local budget additional budget may be sought from provincial or national budgets," he said.

The president also reminded the need to consider the price of goods in the province which was higher than in other places when calculating the budget for the rehabilitation and reconstruction.

To the people he appealed to face the disaster rationally and would not link it with factors which are not rational and against religions.

On the occasion President Yudhoyono extended aid including school bags, biscuits, milk and household utensils received by two quake children representing all the victims.

He also gave Rp3 billion worth of cash to the administrations of Sorong district and mayoralty through the governor of West Papua.

Governor Atururi in his expose said that 82 tremors had occurred in the region from January 4 to 21 in various magnitude and as a result four people had died and 509 others had been wounded including 31 who were seriously wounded.

The quake first struck on January 4 at 4.40am local time measuring 7.2 on the Richter Scale followed by another one at 7.33am local time measuring 7.6 on the Richter Scale.

He said the number of evacuees reached 17,499 when the quake first hit. The number had now dropped to 327 but the cost of material damage caused by the quake reached Rp985 billion, he said. (ANTARA)

## **2. Hasil Survey TI: Kepolisian dan Peradilan Paling Banyak Praktik Suap**

Kepolisian dan peradilan merupakan lembaga yang banyak melakukan praktik suap-menyuap. Sementara itu Yogyakarta merupakan daerah terbersih dari praktik korupsi, sedangkan Kupang daerah paling korup.

Demikian hasil survei Transparency International (TI) Indonesia yang disampaikan, kemarin, dalam "Presentasi Hasil Survei Pengukuran Korupsi di 50 Kota di Seluruh Indonesia dan Indeks Suap terhadap 15 Institusi Publik".

"Polri tercatat menjadi institusi yang paling sering terjadi praktik suap-menyuap. Sedangkan lembaga peradilan menjadi lembaga yang paling banyak menerima uang suap," kata Manajer Riset dan Kebijakan TII Frenky Simanjuntak.

Ia mengatakan, survei indeks persepsi korupsi yang dilakukan TI bertujuan untuk mengukur sejauh mana interaksi aksi suap antara pelaku bisnis dengan institusi politik dibandingkan total kontrak. Sebanyak 1.218 pelaku bisnis yang diwawancarai, 48 persen mengaku terjadi interaksi suap. "Hampir setengahnya melibatkan interaksi suap," kata Frenky.

Jika dilihat dari persentasenya, penerimaan suap di kepolisian tercatat 48, urutan kedua ditempati oleh bea cukai. Dari 423 jumlah responden, katanya, 41 persen diantaranya mengaku pernah dimintai uang suap.

"Yang menarik adalah lembaga peradilan. Meski dari 204 responden, hanya 30 persen yang mengaku pernah diminta suap, namun total penerimaan uangnya sangat fantastis, yakni sebesar Rp 102,4 juta. Yang lain jumlahnya di bawah itu. Yang jelas, angka ini cukup spektakuler," ujarnya menambahkan.

Terkait dengan survei indeks persepsi korupsi yang dilakukan terhadap 50 daerah di Indonesia, Frenky mengatakan bahwa Yogyakarta yang dikenal dengan sebutan kota pendidikan mendapat predikat kota terbersih dari persepsi korupsi. Sementara, Kupang, NTT, terpilih sebagai kota terkorup.

"Yogyakarta mendapat skor indeks persepsi korupsi (IPK) tertinggi sebagai kota terbersih dari korupsi dengan angka 6,43. Palangkaraya, Banda Aceh, Jambi, dan Mataram menempati urutan berikutnya yang masuk dalam lima besar," ujarnya.

Ia mengatakan, terpilihnya Yogyakarta sebagai kota terbersih, karena sejak 2006 daerah itu membentuk Dinas Perizinan yang merupakan pengembangan unit pelayanan terpadu satu atap (UPTSA). Kemudian, Yogyakarta juga pernah mendapat penghargaan pelayanan prima pada 2008 lalu. Sedangkan Palangkaraya, pernah mendapatkan penghargaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terbaik pada Desember 2007.

Frenky menyimpulkan, dari hasil survei tersebut, secara umum dapat dilihat bahwa sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia, dipersepsikan korupsi. "Melihat kenyataan Yogyakarta dan Palangkaraya mendapat skor di atas 6, tapi skor IPK ini memang masih lebih baik dibanding corruption perception indeks (CPI) Indonesia tahun 2008, yaitu sebesar 2,6," ujarnya.

Menanggapi hasil survei TI Indonesia, Deputi Bidang Pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Eko Tjiptadi mengatakan, hasil survei tersebut mendekati kebenaran meskipun banyak pihak meragukan kebenarannya.

"Belum tentu benar semua, malah jangan-jangan ada yang salah. Kalaupun salah, mudah-mudahan bukan karena faktor penerapan metodologi, tetapi kesalahan responden. Misalnya, survei itu bukan dilakukan kepada responden yang pas untuk memberikan jawaban," ujarnya.

Menurut Eko, hasil survei ini menunjukkan perlunya dilakukan upaya peningkatan terhadap pelayanan publik. Meski demikian, ia menambahkan, untuk memperbaiki kinerja pelayanan publik ini, tidaklah mudah sebagaimana dibayangkan banyak pihak. (Suara Karya)

### **3. Pengamanan di Kedubes Mesir Jakarta Diperketat**

Pengamanan di Kedutaan Besar Mesir di Jalan Teuku Umar 68 Jakarta Pusat, Rabu (21/1), diperketat setelah terjadinya pelembaran tiga molotov ke kedubes tersebut oleh sejumlah orang yang hingga kini masih diselidiki identitasnya.

Berdasarkan pantauan di Jakarta, Rabu (21/1) di Kedubes Mesir tersebut tampak diperkuat oleh beberapa petugas kepolisian, selain satuan pengamanan internal dari pihak kedubes.

Namun, tidak terlihat adanya garis kepolisian di luar gedung kedutaan besar yang memiliki tembok dengan tinggi sekitar tiga meter itu. Selain itu, tampak pula sejumlah mobil polisi tidak hanya di Jalan Teuku Umar, tetapi juga di sejumlah jalan lainnya seperti Jalan Padalarang.

Sedangkan arus lalu lintas di Jalan Teuku Umar itu sendiri tau lancar dan tampaknya tidak terpengaruh oleh kejadian pelembaran molotov tersebut.

Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Ike Edwin kepada wartawan mengatakan, aparatnya memang meningkatkan keamanan di berbagai obyek pengamanan vital seperti kedutaan besar di Jakarta.

#### **Diselidiki**

Mewaspada kemungkinan aksi teroris, Pasukan Anti-Terror Datasemen Khusus (Densus) 88 Polda Metro Jaya turut dilibatkan dalam penyelidikan terkait kasus pelembaran bom molotov di Kantor Kedutaan Besar Mesir di Jalan Teuku Umar No 68, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (20/1), pukul 15.40 WIB.

Penegasan tersebut disampaikan Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Zulkarnaen saat dihubungi SH, Rabu (21/1) pagi. "Densus 88 dilibatkan untuk mem-back up Polres Metro Jakarta Pusat," jelasnya.

Disinggung mengenai motif di belakang pelembaran bom molotov tersebut, Zulkarnaen mengaku pihaknya belum bisa menyimpulkan karena masih dalam proses penyelidikan. Pun ketika ditanya kemungkinan adanya korelasi antara kasus ini dengan peristiwa kebakaran yang menghanguskan tangki No 24 di Depo Plumpang dua hari lalu.

"Kami belum bisa mengatakan kalau pelaku merupakan orang profesional ataupun amatir. Demikian juga hubungan antara kebakaran di Plumpang ataupun usaha gangguan situasi keamanan negara menjelang pemilu. Polisi masih terus melakukan penyelidikan motif dari pelembaran molotov ini," imbuhnya.

Peristiwa pelembaran bom molotov terjadi sekitar pukul 15.40 WIB. Dua dari tiga botol molotov yang dilemparkan beberapa pengendara motor, meledak di tembok pagar Kedubes Mesir. Kedua molotov yang meledak menggunakan media botol berbahan plastik.

Sementara itu, sebuah botol beling yang dilempar ke tembok hanya menjadi pecah tanpa menimbulkan ledakan. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.

Petugas Polres Jakarta Pusat yang mendapat laporan, bergegas menuju lokasi kejadian. Serpihan botol yang berserakan kemudian dibawa ke Polres Jakarta Pusat untuk diteliti dan diselidiki. Hingga kini, Polres Jakarta Pusat telah memintai keterangan tiga orang saksi di lokasi kejadian. (Sinar Harapan)

## **B. EKONOMI :**

### **1. Pemerintah Masih Bahas Diskon Bea Masuk CPO**

PEMERINTAH melalui Departemen Perdagangan (Depdag) masih membahas kebijakan meminta diskon bea masuk atau tarif impor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) Indonesia ke Pakistan. Ketetapan ini diharapkan segera terbit agar produk CPO Indonesia dapat bersaing dengan Malaysia.

"Sampai saat ini kebijakan dan keputusan persoalan itu masih dikerjakan di Departemen Perdagangan," kata Kepala Badan Litbang Departemen Pertanian, Gatot Irianto, di Jakarta, Rabu (21/1), seperti dikutip Antara.

Pakistan selama ini telah mengadakan perjanjian Free Trade Area (FTA) dengan Malaysia dengan memberikan diskon terhadap bea masuk CPO Malaysia sebesar 10 persen.

Kondisi itu, menjadikan harga CPO asal Malaysia lebih rendah dibandingkan CPO Indonesia. Di Pakistan bea masuk sawit ditetapkan 910 rupee per ton.

"Jadi kalau Malaysia mendapat diskon 10 persen berarti 91 rupee lebih rendah dibandingkan Indonesia. Angka itu setara dengan US\$16," katanya.

Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Akmaludin Hasibuan, mengatakan, perlu ada kegiatan menuju Pakistan untuk merundingkan agar CPO Indonesia memperoleh fasilitas yang sama.

Asosiasi lain yang ada di Indonesia sudah meminta GAPKI sebagai asosiasi yang memiliki hubungan erat dengan asosiasi Vanaspati Pakistan (PVNS) untuk berangkat ke Pakistan guna merundingkan fasilitas yang sama dengan CPO Malaysia itu dengan pemerintah Pakistan. "Namun kami juga harus berdiskusi dengan pemerintah terlebih dahulu."

Pihaknya telah menyusun tim yang akan diutus membicarakan persoalan itu.

Akibat perlakuan yang berbeda itu, volume ekspor CPO Indonesia ke Pakistan selama beberapa bulan terakhir turun hingga 350 ribu ton dan Indonesia kehilangan pendapatan hampir Rp800 miliar.

Pakistan dinilai merupakan poin penting bagi Indonesia karena negara itu menjadi pintu masuk bagi ekspor CPO Indonesia ke sejumlah negara Asia Tengah seperti Afganistan, Kirgistan, Kazaktan, dan lainnya.

Pada 2009, produktivitas sawit Indonesia ditargetkan mencapai 19,8 hingga 20 juta ton atau meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 17 hingga 18,6 juta ton. (Jurnal Nasional)

## **2. Mekanisme Impor Pangan Terlalu Mudah**

KEBIJAKAN impor produk pangan strategis terlalu mudah dan tarififikasi rendah. Ekonom Pertanian, Universitas Gadjah Mada (UGM), M Maksun berpendapat, kebijakan importasi produk-produk pangan strategis terlalu dimanjakan oleh kemudahan perdagangan. Ketika berbagai komoditas pangan dunia rendah, misalnya beras, segala upaya dilakukan agar terjadi impor dengan alasan stabilisasi. "Potret ketergantungan ketahanan pangan berbasis importasi karena jebakan pangan murah," katanya, saat acara seminar Revitalisasi Peran dan Fungsi Bulog, di Yogyakarta, Rabu(21/1).

Kebijakan pangan murah ini, serta merta menafikan kepentingan politik yang paling esensial bagi sebuah negara yaitu kedaulatan. Ketergantungan ketahanan pangan bangsa ini nyata-nyata terjadi dengan mengabaikan kepentingan kedaulatan pangan.

Dia mencontohkan, kisruh pergulaan telah melengkapi "jual diri" kedaulatan bangsa dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. "Jual diri itu membius bangsa ini dengan semboyan swasembada gula, meski palsu dan menipu karena terbatas bagi gula konsumsi."

Untuk menutup kebutuhan industri, telah diizinkan importasi raw sugar besar-besaran bagi industri gula rafinasi. Kebijakan itu masih ditambah dengan izin impor langsung oleh produsen makanan dan minuman. Importasi gula dan gula mentah itu mencapai 30 persen dari kebutuhan.

Krisis memuncak awal Agustus 2008 ketika gula rakyat tani tidak terserap pasar dan harga turun sebagai akibat bocornya gula rafinasi ke pasar konsumsi.

"Krisis gula ini kasusnya persis sama dengan komoditas lain seperti kedelai, beras, dan gandum," ucap Maksun.

Swasembada kedelai 1992 telah dirusak dengan kebijakan impor beralih efisiensi, hingga produksi nasional dari tahun ke tahun terus menyusut. Produksi kedelai tahun 1995 bisa mencapai 1,5 juta ton, tahun 2005 hanya 808 ribu ton, tahun 2006 748 ribu ton, dan tahun 2007 sebesar 608 ribu ton.

Paket kebijakan pemerintah yang dikeluarkan Februari tahun lalu tentang penurunan bea masuk (BM) impor beras 18,2 persen, paket impor kedelai nol persen, turunya PPN impor kedelai menjadi dua persen dan bebasnya PPN impor terigu, membuat ketergantungan impor pangan makin nyata dan tidak terkendali.

Direktur Utama Bulog, Mustafa Abukakar, mengatakan, produksi beras beberapa tahun terakhir cukup menggembirakan dengan capaian prestasi selama tahun 2008 tidak impor.

"Bulog sebagai satu lembaga yang ditunjuk pemerintah melakukan ekspor maupun impor beras. Tahun 2008 tidak impor sama sekali, meski tahun sebelumnya kita impor 1,3 juta ton," ujar dia.

Tahun 2007, rencananya pengadaan beras dari dalam negeri 1,5 juta ton dan kuota impor 1,5 jt ton. Karena produksi meningkat impor beras ditekan menjadi 1,3 juta ton. Tahun lalu, semangat Bulog dan semua pihak terus dipompa, akhirnya pengadaan dalam negeri mencapai 3,2 juta ton.

Padahal, tahun 2008 pasaran dunia memperkirakan Indonesia masih impor beras sebesar 1,1 juta ton, mengingat tahun sebelumnya impor 1,3 juta ton.

"Tidak adanya impor tahun 2008 bisa menghemat devisa negara US\$500 juta, dan sekitar Rp13 triliun dana bergulir ke sektor pertanian hingga bisa menyejahterakan petani." (Jurnal Nasional)

### **3. Realisasi Investasi 2008 Lampau Target**

Realisasi penanaman modal sepanjang 2008 mencapai USD17,13 miliar. Angka tersebut melampaui target yang dipatok USD15,5 miliar.

Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) M Azhar Lubis mengatakan, sepanjang 2008, investasi tumbuh hingga 20,5% dari target sebesar 15%. Pertumbuhan terutama didorong oleh realisasi penanaman modal asing (PMA).

"Kendati ada penurunan nilai investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN), tidak mengganggu total pertumbuhan investasi 2008," kata Azhar di Jakarta kemarin. Data BKPM mencatat, realisasi investasi 2008 sebesar USD17,13 miliar setara dengan Rp154,19 triliun. Angka ini tumbuh 20,5% dibandingkan 2007 sebesar USD14,22 miliar atau Rp127,94 triliun.

Kontribusi terbesar investasi 2008 adalah PMA sebesar USD14,87 miliar (Rp133,83 triliun), naik 43,8% dari USD10,34 miliar (Rp93,06 triliun) pada 2007. Berbeda dengan PMA, PMDN justru melorot tajam hingga 41,6% menjadi USD2,26 miliar (Rp20,36 triliun) dari USD3,88 miliar (Rp34,88 triliun) pada 2007.

Realisasi investasi PMA sebagian besar teralokasikan pada sektor transportasi, gudang, komunikasi senilai USD8,529 miliar dengan jumlah proyek 35 unit. Disusul kemudian pada sektor industri logam, mesin, dan elektronika senilai USD1,281 miliar dengan 141 proyek.

Selanjutnya, masuk industri kendaraan bermotor dan transportasi lainnya senilai USD756,2 juta dengan 47 proyek, industri kimia dan farmasi USD627,8 juta (42 proyek), dan perdagangan dan reparasi USD582,2 juta (375 proyek).

Realisasi investasi tersebar di DKI Jakarta sebesar USD9,927 miliar sebanyak 434 proyek, Jawa Barat USD2,552 miliar (293 proyek), Banten USD477,8 juta (99 proyek), Riau USD460,9 juta (8 proyek), Jawa Timur USD457,3 juta (73 proyek).

Terdapat lima negara yang paling banyak menyumbangkan nilai investasi PMA, yakni Mauritius senilai USD6,477 miliar (5 proyek), Singapura USD1,487 miliar (184 proyek), Jepang USD1,365 miliar (130 proyek), Inggris USD513,4 juta (57 proyek), dan Malaysia USD363,3 juta (74 proyek).

Terkait penurunan realisasi investasi kelompok PMDN, Kepala BPKM Muhammad Lutfi sebelumnya menduga ini terjadi karena banyaknya investor dalam negeri memanfaatkan usaha melalui badan usaha berbadan hukum asing. Menurutnya, hal itu dilakukan karena besarnya fasilitas kemudahan perpajakan yang harus ditanggung dibanding kalau harus menggunakan lembaga usaha berbadan hukum nasional.

Menurut Lutfi, pajak perusahaan yang harus ditanggung investor di Indonesia tidak kurang dari 30%. Angka ini 10% di atas tarif pajak perusahaan yang dikenakan pada investor di Singapura sebesar 20%.

Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Erwin Aksa mengatakan, besarnya realisasi investasi PMA disebabkan besarnya kapasitas permodalan yang dimiliki kelompok investor tersebut. Sementara itu, investor PMDN dengan kepemilikan modal yang tinggi masih sedikit.

"Maka itu, sektor- sektor yang digarap kalangan investor asing biasanya sektor strategis dengan kebutuhan modal yang besar seperti energi, telekomunikasi, dan automotif. Sementara PMDN, biasanya menasar ke sektor yang tidak terlalu besar meski ada juga yang ikut menasar ke sektor properti," ujarnya. (Koran Sindo)

## **C. SOSBUD**

### **1. FK Unair Diaudit Tim Audit Internasional Belanda**

Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya menjalani audit dari Tim Audit Internasional dari Belanda selama tiga hari mulai dari Senin (19/1) hingga Rabu ini.

Dekan FK Unair, Prof. Dr. Mohammad Amin, dr., SpP(K) mengatakan, audit kali ini dilakukan sebagai langkah nyata FK Unair menuju internasionalisasi.

"Audit pendidikan ini sebagai tahap awal untuk menuju akreditasi internasional," katanya.

Menurut dia, untuk meraih akreditasi internasional tidak bisa dilakukan langsung, sehingga harus melalui prosedur yang ditetapkan, yaitu melalui audit dari sebuah tim dulu. Dari tim audit inilah nanti yang akan memberikan rekomendasi.

"Jika dari temuan tim audit terdapat kekurangan maka akan diperbaiki dengan bantuan dan fasilitas perbaikan atau asistensi dari tim audit," katanya.

Baru setelah dinilai benar-benar siap untuk akreditasi internasional, maka FK Unair segera melangkah ke akreditasi tersebut.

"Jadi prosedurnya memang begitu, tidak bisa langsung tiba-tiba ke akreditasi. Saran-saran dari beberapa lembaga akreditasi pun memang harus melalui proses seperti ini," kata Prof. Mohammad Amin.

Selain itu, tiga pakar auditor pendidikan kedokteran asal Belanda, dalam audit di FK Unair ini juga disertai seorang observer, yaitu pihak yang menjembatani dalam pemberian sponsor.

Sebab dari observasi sponsor inilah bisa diambil manfaatnya, yaitu bagaimana mendapatkan dana sebagai biaya memperbaiki sesuatu yang masih kurang sebelum menuju akreditasi internasional.

"Jadi audit ini merupakan langkah awal FK Unair untuk meraih akreditasi internasional," kata Prof. Amin yang juga sebagai Guru Besar Ilmu Penyakit Paru di FK Unair.

Sementara itu, Ketua Tim Pakar Pendidikan Kedokteran Belanda, Prof. Rein Pieter Zwierstra, mengatakan bahwa selama tiga hari melakukan audit baik melalui tatap muka, peninjauan kurikulum, fasilitas yang ada, dikatakan bahwa FK Unair banyak yang cukup baik.

"Memang ada yang masih harus terus dibenahi yang sifatnya secara terus-menerus, yaitu pemenuhan fasilitas perpustakaan dimana masih banyak buku-buku yang sudah terlalu lama, sehingga hal itu harus diimbangi dengan pengadaan buku yang baru," katanya. (ANTARA)

**D. HANKAM : Tidak Ada**

**E. HUKUM :**

### **1. BPK Sulit Audit Proyek Pinjaman Asing**

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Anwar Nasution mengatakan, pihaknya tidak bisa memeriksa pemanfaatan keuangan proyek-proyek pemerintah yang dibiayai pinjaman dan bantuan luar negeri.

"Kini selain tinggal perpajakan dan biaya perkara yang dipungut Mahkamah Agung, proyek-proyek yang dibiayai oleh pinjaman dan bantuan luar negeri juga tertutup bagi pemeriksaan BPK," ujar Anwar saat meresmikan gedung baru BPK di Jakarta kemarin.

Menurut dia, kondisi ini kontras dengan kecenderungan keterbukaan beberapa instansi pemerintah yang bersedia diaudit BPK. Adapun beberapa instansi pemerintah yang telah

membuka diri untuk diaudit adalah di sektor minyak dan gas serta lingkungan hidup. "Ini menjadi objek baru pemeriksaan BPK,"katanya.

Mengutip Laporan Perkembangan Pinjaman Luar Negeri Triwulan II/2008 yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Departemen Keuangan, sejak awal 1960-an hingga akhir Juni 2008, pemerintah telah menandatangani 4.484 perjanjian pinjaman dengan kreditor.

Total nilai pinjaman luar negeri bruto yang ditanda-tangani itu mencapai USD213,531 miliar berdasarkan kurs rupiah per 30 Juni 2008. Namun dari total nilai komitmen bruto ini, terbagi dalam beberapa kelompok berdasarkan perkembangannya. Pertama, pembatalan pinjaman (full cancellation) se-banyak 44 perjanjian pinjaman senilai USD958 miliar. Kedua, pembatalan sebagian atas nilai pinjaman, mencapai USD23,334 miliar.

Ketiga, penambahan atas pagu pinjaman senilai USD1,693 miliar. Mengacu pada kelompok pinjaman berdasarkan perkembangannya, total nilai kumulatif komitmen neto sampai 30 Juni 2008 sebanyak 4.440 perjanjian pinjaman, dengan nilai USD190,932 miliar.

Menanggapi itu, Ketua Koalisi Anti Utang Dani Setiawan mengatakan bahwa kesulitan BPK mengaudit proyek-proyek yang didanai pinjaman dan bantuan luar negeri disebabkan penandatanganan persetujuan pemberian pinjaman (loan agreement) sering kali mengabaikan prinsip akuntabilitas, tertib administrasi, serta tidak jarang transaksi dilakukan secara tidak wajar.

Akibatnya, kata dia, selain tercecer di berbagai instansi pemerintah, data- data tentang loan agreement kemungkinan hilang sehingga sulit diaudit kembali. "Itu sudah sejak lama dilakukan," ujarnya. Agar kesulitan menjalankan fungsi kontrolnya terhadap proyek-proyek tersebut berhasil, saran dia, seharusnya DPR mendesak pemerintah, baik Departemen Keuangan maupun Bappenas, membuka keran informasi terkait proyek-proyek tersebut.

"BPK tidak bisa sendirian. Harus ada dukungan politik DPR agar pemerintah membuka semua informasi hal tersebut," lanjutnya. Lebih lanjut Anwar mengatakan, tugas BPK semakin meluas setelah diundangkannya UU No 15/2006 tentang BPK. UU tersebut mengembalikan kemandirian BPK dalam hal anggaran, organisasi, dan karyawan, termasuk menetapkan metodologi pemeriksaan dan penyusunan laporan pemeriksaan tersebut. (Koran Sindo)

**F. OLAH RAGA : Tidak Ada**

**G. LINGKUNGAN HIDUP :**

#### **1. 30 Perusahaan Sawit Langgar Kawasan Konservasi**

SEKITAR 30 perusahaan perkebunan sawit di Sumatera termasuk Riau melanggar kawasan konservasi dan hutan lindung. Gabungan Pengusaha Perkebunan Kelapa Sawit diminta menertibkan para pengusaha yang melanggar ini.

Dalam rilis yang diterima Jurnal Nasional, Menteri Kehutanan, MS Kaban meminta, perbankan tidak memberikan kredit kepada pengusaha perkebunan sawit yang membuka hutan lindung untuk lahan sawit.

Dia meminta, semua bisa kompak mengatasi masalah seperti ini. "Areal konservasi dan hutan lindung di Sumatera yang dijadikan lahan perkebunan sawit tanpa izin mencapai ratusan ribu hektare," katanya di Jakarta, Rabu(21/1) usai menghadiri acara Forum Dialog Kehutanan di LKBN Antara.

Sebelumnya, Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Departemen Kehutanan (Dephut), Darori mengatakan, pemerintah mengidentifikasi perambahan di kawasan konservasi dan akan menindak tegas serta menyelesaikan melalui proses hukum.

Bagi masyarakat yang melakukan perambahan di kawasan konservasi dan hutan lindung akan dicarikan jalan keluar salah, satunya relokasi. Dia memperkirakan, ada ribuan perambah yang menduduki kawasan konservasi secara tidak sah. "Lahan konservasi disulap menjadi perkebunan sawit, karet, dan perumahan warga."

Untuk Riau, ada tujuh kawasan konservasi yang terancam perambahan yaitu, Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), Tamah Hutan Raya (Tahura) Sultan Syarif Hasyim, Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT), hutan lindung Bukit Suligi, hutan lindung Mahato, hutan lindung Rimbang Baling, dan taman suaka margasatwa Senepis.

Dari pendataan Dephut di tiga kawasan konservasi dan hutan lindung di Riau, ada 40.850 hektare lahan yang dirambah dan dirubah menjadi lahan sawit maupun tempat tinggal.

### **Dialog Macet**

Sementara itu, Kaban juga mengatakan, upaya dialog membahas pemberantasan pembalakan liar (illegal logging) dengan Malaysia menemui jalan buntu. Menteri Kehutanan Malaysia sudah datang ke Indonesia buat dialog, tetapi tidak menemukan jalan keluar. "Dialog dengan Malaysia masih macet. Kalau dengan China jalan," ujar dia.

Dia mengatakan, pemecahan masalah pembalakan liar selama ini telah dilakukan pemerintah melalui langkah diplomasi.

Pemerintah Indonesia meminta bantuan dari LSM Internasional yang bergerak di sektor kehutanan dan lingkungan hidup buat membantu pemecahan masalah illegal logging dengan dunia internasional.

Melalui Inpres Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Ilegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Indonesia, ada 18 institusi yang diberi tanggung jawab memberantas illegal logging. "Jadi, sangat tidak mungkin ke-18 instansi ini terlibat semua dalam masalah itu." (Jurnal Nasional)

## **III. ARTIKEL :**

### **1. Membangun Kembali Gaza (oleh Mayjen (Purn) AT Paruntu)**

LAPORAN Sekretaris Jenderal PBB Boutros Boutros Ghali tentang Agenda Perdamaian Dunia atau Agenda for Peace, 31 Januari 1992, diterima oleh Dewan Keamanan PBB sebagai acuan bagi penyelesaian konflik. Di situ diutarakan bahwa penyelesaian konflik di negara-negara anggota pada tahap awal adalah mengedepankan preventive diplomacy dengan mengirim utusan khusus Sekjen PBB ke negara yang mengalami konflik.

Apabila misi ini berhasil, terdapat dua kemungkinan yaitu damai antarfaksi yang bertikai, atau faksi yang bertikai membutuhkan PBB mengawasi perdamaian yang disebut peace keeping. Indonesia pernah mengalami kehadiran PBB dalam penyelesaian masalah Irian Barat dengan Belanda pada 1963 disebut UN Temporary Executive Authority (UNTEA), atau PBB dapat memaksakan peace making seperti penyelesaian di Timor Timur.

Bahwa sesuai isi Piagam PBB Bab VIII diatur peran organisasi kawasan beserta organisasi lainnya untuk mengusahakan solusi damai bagi penyelesaian konflik, seperti kesepakatan di antara negara anggota ASEAN bahwa bila pecah konflik diselesaikan dengan solusi politik antarnegara anggota, dan bila gagal diangkat ke Mahkamah Internasional (International Court of Justice). Kita sudah mengalami hal ini dalam penyelesaian kasus Sipadan-Ligitan antara RI-Malaysia.

#### **Peran Negara Arab**

Upaya Mesir dalam penyelesaian konflik di kawasan Timur Tengah — meskipun bersama beberapa negara Arab yang tidak hadir bersidang di Doha serta merencanakan melanjutkan sidang ke Kuwait — ternyata berhasil memberikan bobot pada penyelesaian konflik di Gaza, yang akhirnya sejak hari Minggu (18/1) Israel menarik satuan tempur di Gaza.

Kemudian Arab Saudi pada Senin (19/1) siap memberikan bantuan membangun kembali Gaza sebesar US\$ 1 miliar. Hal semacam ini diatur pada post-conflict peace-building, yakni mekanisme masyarakat internasional guna membangun kembali infrastruktur yang hancur akibat perang.

Namun, masalahnya sekarang bola berada pada pihak Hamas karena pertama apakah Hamas sebagai warga Palestina di Gaza mengakui bahwa mereka adalah bagian utuh negara Palestina yang dipimpin Presiden Mahmoud Abbas? Kedua, apakah Hamas akan tetap menembakkan roket ke utara Gaza yang dihuni Israel?

#### **Belajar dari RI**

Semasa Perang Kemerdekaan RI, para pemuda dari berbagai organisasi seperti Barisan Keamanan Rakyat (BKR) serta laskar-laskar melebur diri menjadi Tentara Rakyat Indonesia (TRI) pada Januari 1946, yang akhirnya menjadi TNI pada 3 Juni 1947. Para pejuang dengan latar belakang yang berbeda itu tidak memproklamasikan tempat perjuangan mereka yang tersebar di pulau-pulau besar lalu memisahkan diri dari NKRI.

Lain dengan model Hamas di Gaza yang semula berjuang bersama faksi Fatah pimpinan Yasser Arafat untuk mendapatkan tanah Palestina sejak 1948. Kemudian tercapai perjanjian damai 4 Mei 1994 antara PLO dan Israel di mana Yasser Arafat adalah pemimpin Palestina pertama, kemudian setelah wafat digantikan Presiden Mahmoud Abbas.

Pembangunan kembali Gaza oleh negara donor seperti Arab Saudi yang akan disusul negara donor lainnya hanya akan terlaksana apabila Hamas merujuk pada perdamaian 1994. Bandingkan, teritorial Palestina pimpinan Arafat tidak seluas teritorial RI pimpinan Presiden Soekarno, yang ketika itu dapat mempersatukan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

Sudah menjadi tugas negara untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darahnya. Dengan Presiden Mahmoud Abbas mempunyai tanggung jawab bahwa Gaza sebagai bagian utuh Palestina, dia menjalankan diplomasi maraton ke New York dan Mesir. Pada akhirnya Israel meninggalkan unsur satuan daratnya dan pada waktunya dipastikan kemudian meninggalkan Gaza, bila International Monitoring Force sesuai resolusi DK PBB hadir.

Penulis pernah bertugas di United Nations Emergency Force di Timur Tengah, UNTAC di Kamboja, serta Penasihat Militer RI untuk PBB di PTRI New York.(Sinar Harapan)

## **2. Perang Palestina dan Kekalahan Israel (Oleh Sultan Sulaiman)**

DUA puluh enam hari invasi Israel ke Gaza menorehkan luka teramat dalam. Bukan hanya bagi Palestina, tapi juga bagi dunia. Segala bentuk kecaman tak dihiraukan.

Bahkan warning PBB tak mendapat gubris apa-apa. Dalam kondisi ini Israel mematenkan posisinya sebagai bangsa yang arogan luar biasa. Menyorot warga sipil Palestina yang banyak dikorbankan akan membuat kita berduka meratapi nasib tragis yang menimpa mereka.

Keluarga yang terbunuh, tempat tinggal yang luluh lantak, serta kerugian psikis yang tidak bisa ditakar. Lalu apakah kondisi ini tidak cukup memberikan fakta untuk menempatkan Israel sebagai bangsa tertuduh yang tak mengindahkan kemanusiaan?

Apalagi jika ditambah rangkaian data yang merujuk pada tindak kejahatan perang. Mulai dari senjata kimia sampai pada tindak genosida yang disengaja. Atau penyerangan pada sarana-sarana publik yang harusnya aman dari incaran peluru. Fakta ini seharusnya telah cukup untuk menyeret Israel ke Mahkamah Internasional.

Terkait gencatan senjata sepihak yang didengungkan Israel, setidaknya ada dua asumsi yang merebak. Pertama, Israel telah kalah perang. Kedua, sekadar memberikan apresiasi pada partnernya, Amerika Serikat, yang akan melakukan pelantikan presiden terpilih, Barack Obama.

Menurut hemat penulis, sebenarnya Israel dalam posisi ini telah kalah perang melawan Palestina (Hamas). Hanya karena tabiat dasar arogan, Israel jadi enggan mengakui. Momen pelantikan Obama dijadikan tameng untuk membahasakan kekalahan dengan topeng apresiasi.

Aroma kekalahan perang itu tercium dari gagalnya Israel menguasai Gaza dalam waktu dua puluh dua hari. Jika melihat operasi militer yang dilancarkan, tidak mungkin penguasaan itu memakan waktu yang berlarutlarut. Pengarahan 10.000 pasukan dengan operasi darat, laut, dan udara amat tidak logis untuk target penguasaan Gaza yang hanya dipertahankan oleh 1.000-an pasukan Hamas.

Apalagi jika menakar peralatan perang yang digunakan. Faktanya, kemenangan Israel atas Palestina (Hamas) yang seharusnya menjadi kado tahun baru bagi rakyatnya yang dilanda euforia pemilu raya, tak pernah terealisasi. Bahkan Israel harus mengurut dada atas gagalnya ambisi itu. Imbasnya, Israel berhadapan dengan serapah dunia atas kebiadaban-nya.

Gerakan anti-Israel merebak. Dunia mengecam dan semakin antipati. Negara-negara yang geram bersikap, mengusir duta besar Israel dari negaranya. Dalam masa gencatan senjata sepihak yang digagasnya, Israel melalui Ehud Olmert menyerukan agar dunia membenci Hamas.

Sayang dunia telah lebih dulu membaca bahwa segala kesalahan hanya pantas disandangkan di pundak Israel. Korban 1.300 jiwa dengan kerugian material yang selangit semakin membuat dunia geram. Namun, sesungguhnya Israel telah mengalami kekalahan atas Palestina. Citra buruk Israel di mata dunia merupakan kekalahan telah yang harus diterima. (Koran Sindo)

**IV. LAIN-LAIN : Tidak Ada**

**V. EDITORIAL :**

**1. Editorial: The rocket story**

Militarily, it is evident that Israel has severely damaged Hamas after its three weeks of massive military attacks, and Israeli leaders perhaps will get lavish reward from the Israeli voters in next month's general election.

It is also very clear that Israel can do anything it likes against the defenseless Palestinian civilians, and finds it very easy to find excuses to attack Palestine. The horror which the Palestinians have to endure, often from their birth until their death, cannot only be blamed on Israel, but also on the Palestinian leaders from Fatah and Hamas who are fighting among themselves.

Israel decided a unilateral cease-fire on Sunday, and Hamas agreed later. Israeli leaders wanted to show a friendly signal to the new US President Barack Obama. No one knows how long the cease-fire will last. Hamas and other factions in Gaza need to seriously consider the act of firing rockets into Israel because it will only give Israel a perfect excuse to kill more Palestinians.

The Israeli government fully realizes the price of Israel's brutal military oppression against the Palestinians – it will be very costly. It is not just Israelis and Palestinians who will pay the price, but the entire world. Terrorists will use this as a perfect justification to spread their terror.

Therefore we are of the opinion that the United Nations Security Council needs to establish a peacekeeping force to restore peace in one of the world's most explosive areas. And Indonesia is apparently acceptable for both warring parties, despite the fact that Indonesia does not have diplomatic relation with Israel.

Israel is totally wrong when it thinks that its military might against its neighbor will quell the resistance of Palestinian independence fighters. Israeli leaders are wrong when they continue to regard – with the full support of the West – Hamas as just a terrorist group. Many of Hamas' principles are opposed by the international community, but who can deny that Hamas won a democratically-held election and therefore it has the legitimate power to rule Palestine? Israel and Western countries only recognize President Mahmoud Abbas of the Fatah faction. It is a divide et impera tactic.

But Hamas is also not at all realistic when it does not recognize Israel and it is ridiculous that it wants to erase Israel from the world map.

No one knows when the Palestinians will be able to live peacefully in their own state. The reconstruction of the devastated Gaza will need billions of dollars and take years to complete, although some Arab countries have pledged to finance the massive rebuilding projects.

It is ironic that President Mahmoud Abbas could only condemn the attack against his political rivals in Gaza. How will the Palestinians be able to realize their dream for an independent Palestine, when their leaders are blinded by their greediness for power?

The ceasefire is very fragile. Arab leaders have committed to helping Palestinians with the support of the European Union. US President Barack Obama, of course, has different opinions and policies from his predecessor George W. Bush. But the US's position on Israel will not drastically change just because of the presence of a new president. And, we, the international community must help to re-establish a more durable cease-fire in Palestine. (The Jakarta Post)

## **2. Tingginya Harapan buat Obama**

Alangkah tingginya harapan dunia terhadap kepemimpinan Presiden Amerika Serikat Barack Obama yang dilantik hari Selasa, 20 Januari 2009.

Presiden ke-44 AS itu diharapkan akan membawa angin perubahan besar ke tengah dunia yang sedang tertekan hebat oleh impitan krisis keuangan, kekacauan iklim, dan amukan perang di sejumlah tempat. Ekspektasi memang luar biasa terhadap Obama, tetapi tantangan yang dihadapinya juga sangat berat.

Masuk akal pula jika muncul pertanyaan, apakah Obama (47) dapat mengatasi segala tantangan itu. Kiprahnya pada 100 hari pertama sangat menentukan, lebih-lebih karena akan digunakan masyarakat AS sendiri maupun komunitas global sebagai ukuran kemampuan Pemerintah Obama melakukan terobosan.

Paling mendesak tentu saja bagaimana Pemerintah Obama mengatasi krisis keuangan global, yang berawal dari AS sendiri, sehingga sering disebut pula sebagai krisis buatan AS, Made in America. Namun, reaksi pasar uang dan saham kelihatannya skeptis menyambut Obama. Indeks harga saham tetap lesu di AS dan berbagai tempat di seluruh dunia, termasuk Asia. Sentimen positif belum terbangun.

Sudah kelihatan tantangan berat yang dihadapi Obama dalam memulihkan krisis keuangan global. Kompleksitas tantangan bertambah karena komunitas dunia seperti tidak sabar lagi bagaimana kebijakan Presiden Obama mengatasi konflik Timteng, krisis Irak dan Afganistan, yang diketahui sarat dengan keterlibatan AS. Sungguh pelik persoalan yang dihadapi, yang penyelesaiannya tidak seperti sekadar membalikkan telapak tangan.

Namun, perlu dikemukakan pula, sebelum melaksanakan pekerjaannya sebagai Presiden AS, Obama sudah mencatat sejarah lompatan perubahan dramatis di AS, yang menggugah seluruh umat manusia di planet Bumi. Obama menjadi personifikasi perubahan itu sendiri.

Barangkali jauh lebih tepat dikemukakan, bangsa Amerika telah mengukir sejarah baru yang memungkinkan seorang keturunan kulit hitam bisa menjadi pemimpin di negara yang didominasi kulit putih itu.

Tidak terbayang sebelumnya keturunan kulit hitam, yang secara historis dalam perjalanan bangsa Amerika diasosiasikan dengan perbudakan, dipilih menjadi presiden oleh kaum yang dulu dikenal pemilik budak. Kini peta kusam rasialisme, primordialisme, dan prasangka ideologis dirobek dan dicampakkan.

Bangsa Amerika memang terus berubah. Terpilihnya Obama juga karena hukum besi perubahan. Kiranya perlu dikemukakan pula, siapa yang tidak mau berubah akan punah. (Kompas)

### **3. Pelajaran dari Inaugurasi Obama**

KURSI kepresidenan Amerika Serikat di Gedung Putih kini resmi diduduki Barack Obama. Untuk empat tahun ke depan, Obama akan mengendalikan satu-satunya negara adidaya itu dengan berbagai tantangan dan peluang.

Obama memang telah mampu menyihir warga Amerika dan bahkan warga dunia ketika ia memenangi pemilu presiden November tahun lalu. Kini, sihir itu kembali muncul lebih dahsyat saat ia dilantik di Capitol Hill, Selasa (20/1).

Prosesi pelantikan Obama sebagai presiden ke-44 AS berlangsung sederhana, tapi memberikan banyak pelajaran berharga yang pantas ditiru.

Pertama, meski dihadiri sekitar 2 juta orang yang memenuhi lapangan National Mall, inaugurasi bisa berjalan dengan aman dan tertib. Tidak ada kegaduhan dan keributan kendati warga harus membayar untuk menyaksikannya.

Kedua, dalam usia yang tergolong muda, Obama yang lahir pada 4 Agustus 1961 itu telah memperlihatkan sikap dan perilakunya sebagai sosok negarawan. Padahal, Obama tergolong politikus pemula karena baru menjadi senator Negara Bagian Illinois pada 2004.

Pada saat inaugurasi itulah, nilai-nilai kenegarawanan ia perlihatkan. Obama menunjukkan rasa hormat dan penghargaan yang besar terhadap pendahulunya, George W Bush, di awal pidatonya dengan ucapan terima kasih.

Tidak sampai hanya di situ. Obama dan istri, Michelle, tanpa sungkan mengantar Bush hingga ke helikopter yang akan membawanya meninggalkan Gedung Putih.

Seusai dilantik Ketua Mahkamah Agung AS, John Roberts, Obama menyalami para mantan presiden, pejabat tinggi dan elite politik, termasuk lawan-lawan politiknya, mengalir tanpa jarak, tanpa hambatan. Singkatnya dengan jiwa besar.

Apa yang dilakukan Obama jelas memperlihatkan bahwa mengelola negara di mana pun membutuhkan komunikasi politik yang efektif. Ia berbanding lurus dengan sistem yang melingkupinya.

Obama menyadari benar bahwa bila komunikasi berjalan lancar, teratur, dan sehat, sistem politik pun memiliki kemampuan merespons yang tinggi terhadap tuntutan perubahan zaman. Itulah sistem politik yang andal, mapan, dan dinamis karena bisa mengembangkan kapasitas dan kapabilitasnya secara berkelanjutan.

Selain itu, Obama menunjukkan pentingnya etika politik. Pada ujung yang satu, elite harus mampu menempatkan diri kapan dan di mana bersaing dan berlomba. Pada ujung yang lain, elite mesti bisa menentukan kapan dan di mana bersatu dan bergandengan tangan.

Model komunikasi politik yang diperlihatkan Obama jelas belum tampak di Republik ini. Dari Soekarno hingga yang sekarang, presiden yang ada bahkan tidak saling berkomunikasi.

Presiden yang sedang berkuasa dan para mantan presiden begitu sulit untuk saling bertemu, saling bersapa. Di antara mereka seperti ada jarak, ada kendala, bahkan di hari-hari bersejarah bagi bangsa ini.

Bagaimanapun komunikasi dan etika menjadi unsur penting sebuah sistem politik. Ia merupakan bagian integral dari sosok negarawan. Adakah bangsa ini memiliki sosok negarawan seperti Obama? Sayang, belum ada....(Media Indonesia)

**Jakarta, 22 Januari 2009**  
**Sub Direktorat Berita**  
**Direktorat Informasi dan Media**  
**Deplu**